

## TAJUK RENCANA

### Menyoal Pedagang di Jalan Perwakilan

**PERNYATAAN** Gubernur DIY Sri Sultan HB X terkait keberadaan pedagang di sepanjang Jalan Perwakilan Yogyakarta, sangat jelas dan tegas. Sultan menegaskan para pedagang yang melakukan aktivitas usaha di kawasan tersebut ilegal karena tidak memiliki izin. Sebab, tanah yang mereka gunakan untuk aktivitas usaha merupakan Sultan Ground (SG). Kraton pun tidak memberikan serat kekanjangan untuk membuka usaha di tempat tersebut (KR 4/1).

Atas dasar itulah mereka yang membuka usaha di sepanjang Jalan Perwakilan untuk *legawa* menerima kebijakan relokasi seperti yang telah disepakati. Namun nampaknya masih saja ada yang tidak terima dengan keputusan tersebut dan tetap ingin membuka usaha di kawasan yang sesungguhnya bukan hak mereka. Dengan dalih telah membayar sewa, mereka merasa punya hak untuk membuka usaha di kawasan sepanjang Jalan Perwakilan.

Wajar bila kemudian Sultan mempertanyakan kepada siapa mereka membayar sewa, sebab tanah yang mereka tempati merupakan SG. Sultan pun siap menerima para pedagang yang ingin bertemu dengannya, namun sejauh ini belum ada surat dari mereka. Bahkan, Sultan 'menantang' mereka berani tidak mengeluarkan pernyataan soal sewa itu, terus uang sewa itu dibayar ke siapa.

Kiranya persoalan pedagang yang membuka usaha di sepanjang Jalan Perwakilan sudah sangat terang benđerang. Mereka yang tidak terima atas kebijakan relokasi boleh dibalang tak ada rasa terima kasih bahwa selama ini mereka telah menggunakan

tanah bukan miliknya, namun tetap diberi kesempatan untuk membuka usaha.

Kebijakan relokasi sebenarnya merupakan langkah 'win-win solution'. Sebab, kalau mau main kuasa, bisa saja mereka digusur tanpa mendapatkan apa-apa, karena tanah yang mereka tempati untuk membuka usaha bukanlah haknya. Membayar sewa tidak bisa melegitimasi hak untuk menempati tanah yang notabene bukan miliknya, apalagi tidak jelas pembayaran sewa itu ditujukan kepada siapa. Boleh jadi, ada oknum yang memanfaatkan kesempatan seolah-olah sebagai pihak yang berwenang menarik sewa.

Padahal, kalau memang hendak menarik sewa, tentu hanya bisa dilakukan oleh pihak yang berhak atas tanah tersebut yakni Kraton Yogyakarta. Namun ternyata Kraton tidak menarik uang sewa, sehingga Sultan 'menantang' para pedagang kepada siapa mereka membayar sewa. Kita tentu berharap persoalan ini tidak berlarut-larut sehingga pembangunan di kawasan Jalan Perwakilan bisa segera dimulai.

Kita yakin pembangunan Jogja Planning Gallery (JPG) di kawasan tersebut juga akan memberi manfaat bagi masyarakat luas. Semuanya pasti sudah dipertimbangkan secara matang, sehingga kesejahteraan masyarakat tetap terjaga. Lebih dari itu, kalau pun masih ada yang tidak puas dengan relokasi pedagang kawasan Jalan Perwakilan, Sultan membuka diri untuk menerima kedatangan mereka. Kiranya ini langkah yang bijak dan diharapkan menghasilkan solusi yang komprehensif. □-d

## Melihat 'Tiket' Bakal Calon DPD

**BATAS** waktu penyerahan dukungan minimal pemilih bagi bakal calon (balon) anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) telah berakhir 29 Desember 2022 pukul 23.59. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur bahwa untuk dapat mencalonkan diri sebagai anggota DPD, seorang calon harus memenuhi minimal dukungan pemilih di sebuah provinsi dengan sebaran dukungan minimal 50% jumlah kabupaten/kota.

Pasal 183 ayat (1) menyebutkan, provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap sampai dengan satu juta orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit seribu pemilih. Lebih dari satu juta hingga lima juta orang harus didukung paling sedikit dua ribu pemilih dan lebih dari sepuluh juta hingga lima belas juta orang harus didukung paling sedikit empat ribu orang. Sedangkan provinsi dengan jumlah pemilih lebih dari lima belas juta orang harus didukung minimal lima ribu pemilih. Setelah itu kandidat karena masih harus melewati dua lapis verifikasi: administrasi dan faktual.

### Memiliki Perbedaan

Meski menggunakan Undang-undang yang sama, verifikasi calon anggota DPD untuk Pemilu 2024 memiliki perbedaan dengan Pemilu 2019, khususnya verifikasi faktual pas-cabernesnya verifikasi administrasi. Metode yang digunakan Pemilu 2019 adalah sampel acak sederhana sebesar 10% dari jumlah dukungan di kabupaten/kota, dengan catatan apabila jumlah dukungan yang diserahkan dan memenuhi syarat lebih dari 10 pendukung. Atau, dengan metode sensus manakala jumlah dukungan yang diserahkan dan memenuhi syarat di kabupaten/kota paling banyak 10 orang pendukung.

### Hamdan Kurniawan

Metode ini diubah melalui Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 yang menggunakan tabel atau rumus *Krejcie and Morgan* untuk menentukan jumlah sampel dari populasi yang diserahkan. Tabel *Krejcie and Morgan* yang memiliki taraf keyakinan sebesar 95% ini telah digunakan pula dalam menentukan jumlah sampel pada proses verifikasi faktual partai politik menjadi peserta Pemilu 2024.



Sebagai gambaran, untuk konteks dukungan calon DPD di DI. Jika calon menyeter 2.000 pemilih sebagai pendukung, maka KPU akan mengambil sampel sebanyak 322 orang pendukung. Jika yang diseter sebanyak 3.000 pendukung, sampel yang diambil sebesar 341 orang, sedangkan jika yang diseter 4.000 pendukung maka jumlah sampel sebanyak 351 orang pendukung. Demikian seterusnya, di mana pengambilan sampel telah ditentukan angkanya melalui tabel atau rumus *Krejcie and Morgan*. Penentuan pencuplikan sampel dilakukan melalui metode *systematic*

*sampling*.

### Konferensi Video

Verifikasi faktual merupakan tahap yang sangat menentukan untuk membuktikan bahwa calon anggota DPD memiliki dukungan yang cukup dari masyarakat. Petugas dari KPU akan menemui pendukung tersampel di tempat tinggalnya atau tempat lain. Dapat pula dikumpulkan calon di kantor PPS atau tempat lain yang disepakati. Jika karena berbagai sebab cara ini belum bisa terlaksana, pembuktian kebenaran identitas dan kebenaran dukungan dapat dilakukan melalui panggilan video atau konferensi video yang memungkinkan petugas KPU bertatap muka dan berbicara langsung dengan pendukung. Bahkan, jika cara yang terakhir inipun tidak dapat dilakukan, calon dapat menyiapkan rekaman video berisi pengakuan dukungan dilengkapi dengan identitas pendukung.

Hasil verifikasi faktual inilah yang nantinya menjadi penentu apakah calon akan berlanjut ke tahap proses pencalonan di bulan Mei 2023 atau berhenti di tengah jalan. Hasil verifikasi faktual merupakan tiket untuk memasuki gerbang pencalonan, yang untuk mendapatkannya mesti ditopang oleh kombinasi antara akurasi data dengan kebenaran pengakuan pendukung. □-d

\*) **Hamdan Kurniawan MA**,  
Ketua KPU DIY Periode 2018-2023

### Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : [opini-kr@gmail.com](mailto:opini-kr@gmail.com) dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkannya fotocopy identitas. Terimakasih.

## Mencermati Masa Depan Pariwisata

**IMF** dan Bank Dunia sepakat memprediksi akan terjadi resesi, baik di negara berkembang maupun negara maju pada 2023. Akan tetapi, kinerja ekonomi DIY periode Juli - September 2022 justru mampu tumbuh 4,68% dibandingkan dengan periode sama 2021. Tiga kategori pendukung sektor industri pariwisata tumbuh hingga 2 digit. Kategori jasa lainnya tumbuh paling tinggi, yaitu 25,44%, diikuti transportasi dan perdagangan 21,74% dan penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 11,03%.

Mengutip hasil data Sakernas Agustus 2022 tercatat kenaikan penyerapan tenaga kerja pada lapangan usaha akomodasi dan makan minum, transportasi dan perdagangan serta jasa lainnya dibandingkan Agustus 2021. Masing-masing naik sebesar 1,61% poin, 1,31% poin dan 0,75% poin.

Salah satunya sebagai dampak membaiknya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap iklim pariwisata di DIY. Seperti tingkat hunian hotel bintang naik 32,21% dan non bintang naik 12,35%. Kemudian ditinjau dari sisi transportasi menunjukkan jumlah penumpang kedatangan angkutan udara naik 5 kali lipat terhadap Agustus 2021. Sementara itu jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung di DIY pada Agustus 2022 mencapai 640 wisatawan atau naik 6 kali lipat dibandingkan Agustus 2021. Ini memberikan sinyal bahwa pariwisata di DIY telah mulai tumbuh kondusif.

### Prioritas Utama

Kunjungan wisatawan ke DIY sepanjang tahun 2022 diprediksi mencapai 7 juta orang (KR, 17/11/2022). Kini, rekreasi sudah menjadi kebutuhan pokok. Refreshing, berhenti dari rutinitas sejenak untuk kembali menemukan semangat dan motivasi yang lebih baik telah menjadi prioritas utama. Bersamaan dengan perayaan Hari Raya Natal, Tahun Baru dan musim liburan sekolah, daya

### Istanti

tarik potensi wisata unggulan kian menjadi incaran para wisatawan. DIY dengan berbagai potensi yang dimiliki menjadi salah satu pilihan.

DIY masih menyandang icon sebagai kota pariwisata. Berbagai pesona wisata ada di kota ini. Dari mulai wisata alam, wisata edukatif hingga wisata budaya. Terkait wisata budaya, kembali DIY meraih predikat tertinggi dalam hal pembangunan kebudayaan, melampui Provinsi Bali. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) DIY tahun 2021 mencapai skor 64,22 atau 3,08 poin lebih tinggi dari skor IPK Provinsi Bali. Tak heran bila wisata berbasis kebudayaan mulai menjadi potensi unggulan dan daya tarik wisatawan selain destinasi wisata lainnya.

Dengan ditetapkannya Undang-undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta No 13 Tahun 2012, semakin memantapkan posisi dan peran penting DIY dalam menjaga, mempertahankan dan mengembangkan kekayaan budayanya. Yogyakarta telah menjadi kiblat pengembangan kebudayaan khususnya budaya Jawa, dan menjadi model pengembangan bagi budaya-budaya lain yang ada di Indonesia.

Selain sebagai kota pariwisata, DIY juga mendapat sebutan sebagai kota pendidikan. Tercatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DIY tahun 2022 mencapai 80,64 atau 1,01 poin sedikit lebih rendah daripada DKI Jakarta.

### Hikmah

Tidak dapat dipungkiri, konsumsi rumah tangga masih menjadi mesin penggerak

ekonomi DIY. Sementara pandemi Covid-19 telah memberikan hikmah luar biasa terhadap perkembangan pariwisata. Disinilah, peran kebijakan pemerintah agar dapat menjaga daya beli masyarakat, tidak ada lagi pembatasan mobilitas serta ketersediaan infrastruktur yang memadai menjadi harapan bagi para wisatawan. Juga pelaku industri pariwisata.

Secara sederhana, pemerintah mampu mendorong agar masyarakat tetap dapat menikmati pariwisata, kegiatan kuliner, belanja dan menggunakan produk dalam negeri. Tentu hal ini akan memberikan dampak yang baik bagi pelaku UMKM, mendorong penyerapan tenaga kerja. Pada gilirannya akan mendorong perbaikan kesejahteraan masyarakat. Berikutnya adalah menamatkan semangat untuk mempertahankan nilai nilai budaya dan keunikan ciri khas DIY serta tetap menerapkan wisata digital. □-d

\*) **Istanti MDev**, *Statitisi Muda Papua*  
BPS Provinsi DIY

## Pojok KR

Pencuri di rumah jaksa KPK beraksi hanya 6 menit.

-- **Profesional, yang penting ungkap motifnya.**

\*\*\*

Sultan: pedagang di Jalan Perwakilan tak miliki izin.

-- **Jangan 'ngeyel' tanpa dasar.**

\*\*\*

Menko Polhukam silakan isi Perpu Ciptaker dikritik.

-- **Pasti didengar, tapi belum tentu berubah.**

*Berabe*

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.  
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019). **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirnon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurija Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Bakoro Jati Prabowo SSoS.

**Alamat Percetakan:** Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggung-jawab percetakan

**Alamat Homepage:** <http://www.kr.co.id> dan [www.krjogja.com](http://www.krjogja.com). **Alamat e-mail:** [naskahkr@gmail.com](mailto:naskahkr@gmail.com). **Radio:** KR Radio 107.2 FM.

**Bank:** Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

**Perwakilan dan Biro:**

**Jakarta:** Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

**Wartawan:** H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifulah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

**Semarang:** Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil: Isdiyanto Isman SIP.

**Banyumas:** Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil: Driyanto.

**Klaten:** Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan: Sri Warsiti.

**Kulonprogo:** Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan: Suprpto, SPd, Wakil: Asrul Sani.

**Gunungkidul:** Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragi Dedy TP

## Kedaulatan Rakyat

**Pemimpin Umum:** M Wirnon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPd, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Dra Hj Fadmi Sustitwi, Dra Prabadari, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Atfiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Eddy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafiis:** Joko Santoso SSoS, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

**Pemimpin Perusahaan:** Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

**Manajer Iklan:** Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: [iklan@kr.co.id](mailto:iklan@kr.co.id), [iklankr23@yahoo.com](mailto:iklankr23@yahoo.com), [iklankr13@gmail.com](mailto:iklankr13@gmail.com).

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display... Rp 275.000,00/mm klm, Iklan Keluarga... Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris)... Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm... Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

**Alamat Kantor Utama dan Redaksi:** Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)